Demokrasi : kekuasaan dalam sistem politik negara itu berasal dari rakyat, dijalankan rakyat dan untuk rakyat

Indonesia adalah negara demokrasi dengan pancasila sebagai dasar dan ideologi negara

Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, demos = rakyat dan kratos = kekuasaan

Ciri negara demokrasi :

1. adanya lembaga perwakilan rakyat
2. adanya pemilu
3. adanya lembaga yang mengawasi pemerintah
4. lembaga negara ditetapkan oleh UUD negara

Demokrasi sebagai Sistem Politik

Bentuk pemerintahan menurut Plato :

1. Aristokrasi : dipimpin oleh sekelompok orang untuk kepentingan rakyat banyak
2. Demokrasi : dipimpin rakyat dan dijalankan untuk rakyat
3. Monarki : dipimpin oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan untuk rakyat

Bentuk pemerintahan modern menurut Machiavelli :

1. Monarki : bersifat kerajaan dan dipimpin oleh raja/ sultan/ kaisar
2. Republik : dipimpin oleh presiden / perdana menteri

Indonesia adalah negara demokrasi, tertuang dalam pembukaan UUD'45 alinea ke 4 '..yang berkedaulatan rakyat'= demokrasi. Oleh karena itu, untuk menggunakan hak-hak demokrasi harus sesuai dengan kelima butir Pancasila.

Demokrasi sebagai Pandangan Hidup

Definisi : demokrasi berisi nilai dan norma yang harus dimiliki oleh rakyat yang menginginkan kehidupan demokrasi. Nilai adalah pedoman berperilaku dalam negara demokrasi.

Budaya demokrasi

Rakyat yang mau menerima dan menjalankan secara terus menerus nilai-nilai demokrasi dalam kehidupannya akan melahirkan budaya demokrasi.

Inti budaya demokrasi : kerja sama, saling percaya, toleransi, menghargai keanekaragaman, kesamaderajatan, dan kompromi.

Setiap warga negara dalam negara demokrasi harus menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

Demokratisasi

Definisi : mengimplementasikan demokrasi dan sistem politik negara

Perlu dibentuk lembaga-lembaga demokrasi untuk menjalankan nilai-nilai demokrasi. Contohnya seperti : pemerintah, partai politik, DPR, dan lembaga peradilan.

Prinsip-prinsip demokrasi pancasila :

1. pemerintahan berdasar hukum
2. HAM
3. Musyawarah
4. peradilan yang merdeka

Masyarakat Madani (*civil society*)

Definisi : masyarakat yang demokratis / masyarakat yang beradab

Demokratisasi yang berjalan secara baik akan memunculkan masyarakat mandiri, bertanggung jawab, memiliki kebebasan dan memiliki peradaban. Masyarakat itulah yang disebut masyarakat madani (*civil society*).

Ciri masyarakat madani :

1. pemerintahan yang berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak
2. adanya pembagian kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif)
3. pemerintahan yang bertanggung jawab

Dalam negara demokrasi ada berbagai macam organisasi civil society yang mandiri dan bebas kontrol pemerintah dengan tujuan untuk kebaikan bersama (*public good*). Contoh : usaha memberdayakan masyarakat miskin dan memberdayakan sekolah.

Civil society tersusun dari berbagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki ciri:

1. mencukupi kebutuhan sendiri (swadaya)
2. keanggotaannya bersifat sukarela
3. lahir secara mandiri
4. bebas dan mandiri sehingga berani mengontrol penggunaan kekuasaan negara
5. tunduk pada aturan yang berlaku

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

1. Demokrasi di masa orde lama

a. Demokrasi Parlementer, masa kejayaan demokrasi

Cara kerja :

1. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan yang bebas;
2. Presiden sebagai kepala negara sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri;
3. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet/dewan menteri yang dipimpin oleh perdana menteri dan bertanggung jawab kepada DPR;
4. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR yang dibentuk melalui pemilu multi-partai. Partai politik mayoritas DPR membentuk kabinet;
5. Apabila kabinet bubar, presiden akan menunjuk formatur kabinet untuk menyusun kabinet baru;
6. Apabila DPR mengajukan mosi tidak percaya lagi kepada kabinet yang baru, DPR dibubarkan dan diadakan pemilu;
7. Apabila DPR menilai kinerja menteri/beberapa menteri/kabinet kurang baik, DPR dapat memberi mosi tidak percaya dan menteri, para menteri atau kabinet yang diberi mosi tidak percaya harus mengundurkan/membubarkan diri.

Hal-hal negatif yang terjadi selama berlakunya sistem parlementer adalah sebagai berikut.

- Terjadi ketidakserasian hubungan dalam tubuh angkatan bersenjata pasca-peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu sebagian anggota ABRI condong ke kabinet Wilopo, sebagian lagi condong ke Presiden Soekarno.
- Masa kerja rata-rata kabinet yang pendek menyebabkan banyak kebijakan jangka panjang pemerintah yang tidak dapat terlaksana.
- Telah terjadi perdebatan terbuka antara Presiden Soekarno dan tokoh Masyumi, Isa Anshory, mengenai penggantian Pancasila dengan dasar negara yang lebih Islami tentang apakah akan merugikan umat beragama lain atau tidak.
- Masa kegiatan kampanye pemilu yang berkepanjangan mengakibatkan meningkatnya ketegangan di masyarakat.
- Pemerintah pusat mendapat tantangan dari daerah-daerah seperti pemberontakan PRRI dan Permesta.

Kegagalan demokrasi parlementer disebabkan oleh :

1. Tidak ada anggota konstituante yang bersidang dalam menetapkan dasar negara. Hal ini memicu Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
2. Landasan sosial ekonomi rakyat masih rendah.
3. Dominansi politik aliran, yang lebih mementingkan kepentingan kelompok atau dirinya sendiri daripada kepentingan bangsa.

b. Masa demokrasi Terpimpin

Menurut ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965, pengertian dasar demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong dengan berporoskan Nasakom.

Ciri-ciri demokrasi terpimpin :

1. Terbatasnya peran partai politik.
2. Berkembangnya pengaruh PKI dan militer sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia.
3. dominansi peran presiden dalam penyelenggaraan negara

Pada demokrasi terpimpin terdapat penyimpangan dari prinsip negara hukum dan negara demokrasi menurut Pancasila dan UUD 1945, antara lain adalah sebagai berikut :

- Pelanggaran prinsip "kebebasan kekuasaan kehakiman"
Dalam UU No. 19 Tahun 1964 ditentukan bahwa demi kepentingan revolusi, presiden berhak untuk mencampuri proses peradilan. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 sehingga mengakibatkan kekuasaan kehakiman dijadikan alat oleh pemerintah untuk menghukum pemimpin politik yang menentang kebijakan pemerintah.
- Pengekangan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik
Hal tersebut terjadi terhadap kebebasan pers. Saat itu banyak media massa yang dibatasi dan tidak boleh menentang kebijakan pemerintah.
- Pelampauan batas wewenang
Presiden banyak membuat penetapan yang melebihi kewenangannya tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR.

- Pembentukan lembaga negara ekstrakonstitusional
Presiden membentuk lembaga kenegaraan di luar yang disebut UUD 1945. misalnya Front Nasional yang ternyata dimanfaatkan oleh pihak komunis untuk mempersiapkan pembentukan negara komunis di Indonesia.
- Pengutamaan fungsi presiden.
Pengutamaan fungsi presiden tampak dalam hal-hal berikut.
 - a) Dalam mekanisme kerja, jika MPR dan DPR, tidak berhasil mengambil putusan, persoalan tersebut diserahkan kepada presiden untuk memutuskan.
 - b) Pimpinan MPR, DPR, dan lembaga-lembaga negara lainnya diberi kedudukan sebagai menteri sehingga mereka menjadi bawahan presiden. Padahal menurut UUD 1945 MPR adalah lembaga yang membawahkan presiden dan berkedudukan lebih tinggi dari presiden, sedangkan lembaga-lembaga negara yang lain (DPR, BPK, dan MA) sejajar dengan presiden.
 - c) Pembubaran DPR oleh presiden terjadi karena DPR menolak menyetujui RAPBN yang diusulkan pemerintah. Padahal UUD 1945 mengatur bahwa presiden tidak dapat membubarkan DPR dan jika DPR menolak anggaran yang diajukan, pemerintah menggunakan anggaran tahun sebelumnya.

Akhir demokrasi dipimpin berawal dari pemberontakan G 30 S/PKI, ketika Presiden Soekarno gagal dalam mempertahankan keseimbangan antara kekuatan yang ada di sisinya, yaitu PKI dan militer. Demokrasi dipimpin berakhir dengan ditandai oleh keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk mengatasi keadaan.

c. Demokrasi di Masa Orde Baru

Seluruh kegiatan pemerintahan negara dan kehidupan masyarakat harus berdasar pada Pancasila dan UUD'45. Namun, dalam perkembangan malah mengarah pada pemerintahan sentralistis.

Penyimpangan yang terjadi :

a. Pemberantasan hak-hak politik rakyat

- Jumlah parpol dibatasi hanya PPP, Golkar, dan PDI.
- Pegawai negeri dan ABRI diharuskan mendukung Golkar.
- Pertemuan-pertemuan politik harus mendapat izin penguasa.
- Ada perlakuan diskriminatif terhadap anak keturunan orang yang terlibat G 30 S/PKI .
- Para pengkritik pemerintah dikucilkan secara politik bahkan diculik.

b. Pemusatan kekuasaan di tangan presiden

- Presiden dapat mengendalikan berbagai lembaga negara seperti MPR, DPR, dan MA.
- Anggota MPR yang diangkat dari ABRI, berada di bawah kendali presiden, karena presiden merupakan panglima tertinggi ABRI.
- Selain itu, seluruh anggota DPR/MPR harus lulus penyaringan yang diadakan oleh aparat militer.

c. Pemilu yang tidak demokratis

Pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali penuh dengan kecurangan dan ketidakadilan karena hak-hak parpol dan masyarakat pemilih telah dimanipulasi untuk kemenangan Golkar.

d. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

Akibat dari penggunaan kekuasaan yang terpusat dan tak terkontrol, KKN tumbuh subur.

Pemerintahan Suharto berakhir setelah adanya gerakan mahasiswa dan terjadi pada tanggal 21 Mei 1998.

Adapun hal yang menjadi sebab-sebab kejatuhan Orde Baru adalah sebagai berikut.

1. Terjadi krisis politik dan keruntuhan legitimasi politik.
2. Tidak bersatu lagi pilar-pilar pendukung Orde Baru. Banyak menteri yang tidak lagi mendukung pemerintahan. Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga tidak bersedia lagi menjadi alat kekuasaan Orde Baru.
3. Ekonomi nasional hancur yang ditandai oleh adanya krisis mata uang dan krisis ekonomi yang tidak mampu ditanggulangi.
4. Muncul desakan semangat demokratis dari para pendukung demokrasi.

d. Demokrasi di Masa Kini

- Presiden B.J. Habibie menyatakan bahwa pemerintahannya adalah pemerintahan transisional. Disebut masa transisi karena merupakan masa perpindahan pemerintahan yang selanjutnya akan dibentuk pemerintahan baru yang demokratis dan berdasarkan kehendak rakyat.
- Antara tahun 1998 sampai tahun 1999 dianggap tahun yang penuh gejolak dan diwarnai oleh kerusuhan di beberapa daerah, antara lain konflik di Ambon dan Maluku, kerusuhan di Aceh, dan kerusuhan dan pertentangan di wilayah Timor Timur.
- Pada tanggal 21 Oktober 1999, diselenggarakan pemilihan wakil presiden RI. Calonnya ialah Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz. Pemilihan dilakukan dengan voting. Hasilnya diperoleh Megawati memperoleh suara terbanyak. Dengan demikian, wakil presiden RI periode 1999–2004 ialah Megawati yang dilantik pada 21 Oktober 1999. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, kedudukan Abdurrahman Wahid beralih kepada Megawati dengan wakilnya Hamzah Haz karena adanya ketidakpuasan rakyat selama pemerintahan yang dipimpin olehnya.
- Pada tahun 2004 untuk pertama kalinya bangsa Indonesia melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Pemilu diikuti oleh 24 partai politik. Pemilu dilakukan dalam tiga tahap.
 1. Pertama, pada 5 April 2004 dilaksanakan pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kota/kabupaten, dan DPD.
 2. Kedua, pada 5 Juli 2004 dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden tahap pertama.
 3. Ketiga, pada 20 September 2004 pemilihan presiden dan wakil presiden tahap kedua. Hasil pemilihan tersebut menempatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2004–2009.

Pemilu di Indonesia

Pemilu merupakan salah satu kriteria penting untuk mengukur kadar demokratisasi sistem politik negara.

Sampai saat ini pemilu di Indonesia telah berlangsung sepuluh kali, yakni

1. pemilu masa Orde Lama, yakni pemilu 1955.
2. pemilu masa Orde Baru, yakni pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
3. pemilu masa Reformasi, yakni pemilu 1999, 2004, dan 2009.

Pemilu yang paling demokratis di Indonesia : pemilu 1955.

Selama masa Orde Baru telah dilakukan enam kali pemilu.

- MPR/DPR, DPRD, dan Kepala Desa dipilih oleh rakyat melalui pemilu.
- Pemilihan bupati dilakukan oleh MPR.
- Pemilihan menganut sistem proporsional sehingga diharapkan seluruh suara rakyat diperhitungkan dalam pengisian anggota parlemen. Jika ada kontestan yang tidak memperoleh suara sama sekali, kontestan tetap dijamin memperoleh 5 kursi di parlemen.
- Pemilu bukanlah institusi politik yang berdiri sendiri. Keberadaan dan kualitas pemilu sangat terkenal dengan sistem perlindungan hak-hak politik rakyat yang tercermin dalam sistem kepartaian sebagai hulunya dan struktur kelembagaan parlemen sebagai muaranya.
- Salah satu prinsip yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru dalam mengatur sistem kepartaian adalah prinsip massa mengambang. Kenyataannya prinsip itu diwujudkan dalam upaya untuk menjauhkan rakyat dari kegiatan politik kecuali pada saat-saat pemilu.
- Selama masa Orde Baru tercatat adanya pemilu yang relatif demokratis, yaitu dalam bentuk pemilihan kepala desa. Penghitungan dan pelaporan hasil dilakukan secara terbuka di depan warga pemilih sehingga memperkecil peluang manipulasi suara. Kemenangan ditentukan dengan suara terbanyak dengan jumlah pemilih yang telah memenuhi quorum.

Bangsa Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu yang relatif memenuhi syarat-syarat pemilu demokratis pada pemilu tahun 1999, 2004, dan 2009. Apabila pemilu terlaksana dengan baik (LUBER JURDIL) ada harapan kita akan menuju ke pemerintahan/kehidupan yang lebih demokratis.